

# PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG) DALAM SITUASI BENCANA

## MEMPROMOSIKAN HAK & KESETARAAN GENDER PASKA BENCANA

### Respon Kemanusiaan UNFPA di Sulawesi Tengah



### Penguatan Koordinasi untuk mengatasi Kerentanan

Perempuan merupakan tulang punggung ketahanan keluarga & masyarakat, termasuk dalam situasi krisis. Mempromosikan hak nya, mengatasi kerentanannya, menyediakan kesempatan untuk pemberdayaan akan membantu perempuan & anak perempuan, keluarga dan komunitas dalam membangun kembali kehidupan & menjadi lebih tangguh dalam menghadapi situasi krisis mendatang.

Akibat bencana alam 28 September 2018 yang merenggut 3.000 nyawa dan 170.000 pengungsi di Kota Palu, Kabupaten Sigi & Donggala, UNFPA membantu mengaktifasi koordinasi sub kluster perlindungan hak wanita/ kekerasan terkait gender (PHP KBG/GBV Sub Cluster), memberikan ruang diskusi dan koordinasi bagi pemerintah dan institusi kemanusiaan untuk menghindari kegiatan yang tumpang tindih dan bekerja bersama menanggapi tantangan serta memperbaiki efektifitas program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Grup Whatsapp dimulai untuk memfasilitasi pemberian informasi yang cepat & penyediaan akses dan bantuan kemanusiaan yang tidak merata, isu pernikahan usia anak, pernikahan paksaan, dll. Dibawah koordinasi KPPPA dan Kementerian Sosial, UNFPA memberikan bantuan teknis terkait program dan layanan kunci terkait pencegahan dan penanganan KBG

### INTERVENSI KUNCI:

- Menguatkan koordinasi untuk menangani kerentanan
- Mendirikan Ruang Ramah Perempuan sebagai fasilitas masyarakat
- Menguatkan pencegahan & penanganan Kekerasan Berbasis Gender: kebijakan dan layanan
- Mengembangkan bahan advokasi dalam merespon isu KBG paska bencana

UNFPA bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan pada tingkat nasional & sub-nasional, diantaranya:

- BAPPENAS
- Kementerian pemberdayaan wanita & perlindungan anak – KPPPA dan DP3A
- BNPB
- Yayasan Kerti Praja
- LSM Perempuan KPKPST
- LSM LIBU Perempuan
- Yayasan Pulih

Dan organisasi lokal dan internasional lainnya, anggota Sub Kluster Perlindungan Hak Perempuan– terkait Kekerasan Berbasis Gender (PHP-KBG)

### Lokasi 12 Ruang Ramah Perempuan

- **Kota Palu:** Balaroa, Petobo, Gawalise, Pantoloan Ova.
- **Kabupaten Donggala:** Loli Pesua, Wombo Kalonggo, Balentuma, Gunung Bale
- **Kabupaten Sigi:** Beka, Walatana, Sibalaya Utara, Pombewe

## Mendirikan Ruang Ramah Perempuan (WFS/RRP) sebagai Fasilitas Masyarakat

12 RRP, dikelola oleh 2 LSM Perempuan: KPKPST & Yayasan Libu Perempuan, dengan cepat didirikan untuk memfasilitasi akses informasi & pelayanan kemanusiaan untuk perempuan, anak perempuan dan orang dengan disabilitas juga untuk melaporkan kasus KBG di lokasi pengungsian. Perlengkapan kebersihan untuk perempuan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, perempuan hamil dan perempuan yang baru saja melahirkan. Fasilitator terlatih dalam RRP memberikan dukungan psikososial, pertolongan pertama psikologis (*Psychological First Aid/PFA*) & mengembangkan mekanisme rujukan bagi perempuan yang terkena dampak bencana & perempuan yang pernah mengalami KBG. Aktivitas masyarakat yang beragam & sesi penyadaran masyarakat terkait hak perempuan, kesehatan, jenis kelamin, pemberdayaan, keterampilan hidup, dan mitigasi bencana diselenggarakan secara rutin di sekitar RRP

Fasilitator juga dilatih untuk mengatasi kasus KBG dalam memastikan bantuan terpusat pada penyintas/korban (*survivor-centered assistance*), pendokumentasian yang baik dan memberikan rujukan multisektoral untuk memberikan bantuan cepat dan penyelamatan nyawa. Ruang diskusi/*refresher* kepada pemberi layanan/ fasilitator dan konselor RRP difasilitasi oleh UNFPA untuk mencegah stress dan beban berat diantara fasilitator & konselor pengelola RRP. Aktivitas RRP berkontribusi terhadap penguatan dan pemberdayaan perempuan, penyadaran masyarakat dalam pencegahan & penanganan (termasuk melaporkan melalui mekanisme komunitas) terkait KBG. Berdasarkan arahan DP3A dan permintaan LSM Perempuan & elemen masyarakat, telah disepakati untuk melanjutkan dan memperluas keberadaan & kegiatan RRP. 3 fasilitas berbasis masyarakat yang didukung oleh UNFPA adalah: 12 RRP, 8 Ruang Ramah Remaja (RRR) & 15 Tenda Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi untuk penyediaan dukungan & bantuan rujukan yang lebih baik di Hunian Sementara/ HUNTARA.

## Menguatkan Pencegahan & Penanganan Kekerasan Berbasis Gender : Kebijakan & Layanan

Kondisi hidup yang sulit setelah terjadinya bencana & kebiasaan masyarakat yang bias terhadap gender meningkatkan resiko terjadinya Kekerasan Berbasis Gender. UNFPA memfasilitasi kerjasama dengan pemangku kebijakan dan masyarakat, dalam mengembangkan beberapa materi advokasi terkait kekerasan berbasis gender. Panduan tersebut telah digunakan oleh pemerintah terkait dan organisasi bantuan kemanusiaan dalam memastikan pengelolaan hunian sementara yang ramah terhadap perempuan, untuk mencegah dan penanganan merespon kekerasan berbasis gender.

UNFPA mempromosikan dan memberikan bantuan teknis terkait integrasi pencegahan & penanganan KBG pada tingkatan nasional dan provinsi pada fase darurat awal, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan & anggaran. Petunjuk pelaksanaan standar KBG dalam situasi bencana telah dikembangkan. Berbagai pelatihan mengenai hak perempuan, kesetaraan gender, penanganan KBG, pelibatan laki-laki disediakan bagi pemerintah, mitra pemerintah dan LSM terkait. UNFPA ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan seksual (*PSEA*) yang dilakukan oleh pekerja kemanusiaan dari agensi UN & organisasi partner UN. Prosedur pengoperasian standar PSEA sudah dikembangkan dan disensitisasi; penanggungjawab PSEA sudah ditentukan; & mekanisme pelaporan dari level komunitas menuju tingkat nasional telah dikembangkan.

Dukungan teknis & penguatan kapasitas diberikan dalam meningkatkan koordinasi multisektoral & mekanisme rujukan: kesehatan, polisi, bantuan hukum, memastikan tempat perlindungan yang aman, cukup, tepat, serta bantuan penyelamatan nyawa bagi penyintas/korban KBG. Mekanisme rujukan KBG dikembangkan dan dikuatkan pada komunitas (melalui 12 RRP) di 3 kota/kabupaten terdampak. Berbagai penguatan kapasitas terkait KBG & tatalaksana klinis korban kekerasan diberikan bagi pekerja kesehatan di Puskesmas dan Tenda kepro dalam memperkuat penanganan kesehatan terkait KBG.

## Mengembangkan Bahan-bahan Advokasi dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Situasi Bencana

Dibawah koordinasi sub kluster Perlindungan Hak Perempuan dari KBG, UNFPA mengumpulkan dan menganalisa dampak dan resiko KBG yang dapat di tangani cepat dan tepat oleh berbagai pihak baik oleh pemerintah lokal & organisasi bantuan kemanusiaan. Beberapa bahan advokasi yang dihasilkan adalah: daftar periksa gender, rekomendasi hasil diskusi multisektoral sub kluster PHP, rekomendasi gender, hasil penilaian cepat KBG, SOP KBG dalam bencana, SOP PSEA telah dikembangkan, disensitisasi dan digunakan untuk meningkatkan program & kebijakan untuk merespon dan menangani KBG. Bahan-bahan ini dikembangkan berkolaborasi dengan DP3A Provinsi dan Kabupaten & LSM perempuan, dalam memastikan perencanaan program yang sensitif gender, berbasis hak, untuk perlindungan hak perempuan, termasuk pencegahan & penanganan KBG.